

ARTIKEL AKADEMIK

Negara Kuat atau Negara Boros? Perdebatan Baru tentang Peran Fiskal Pemerintah

Peran Fiskal, Kapasitas Negara, dan Kualitas Belanja Publik

Oleh

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

RudyCT Academic Series 2026

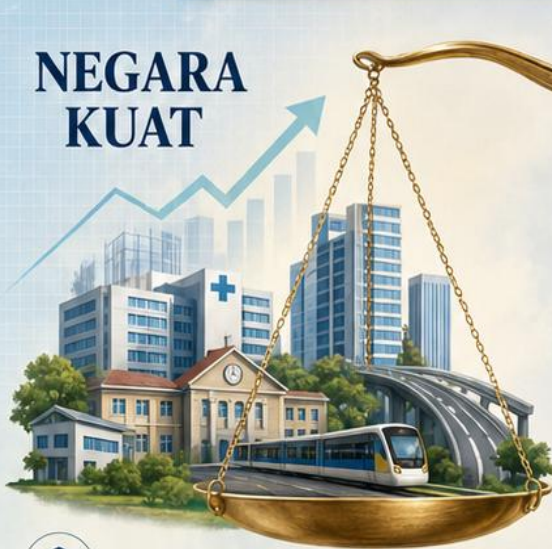
Bogor, Indonesia • Juli 2026

NEGARA KUAT ATAU NEGARA BOROS?

Perdebatan Baru tentang Peran Fiskal Pemerintah

KAPASITAS • KUALITAS BELANJA • AKUNTABILITAS

NEGARA
KUAT



Investasi Publik
Produktif



Layanan Dasar
Berkualitas



Infrastruktur &
Pertumbuhan



Kapasitas Institusi
yang Kuat



Nilai Publik
Meningkat



Kebocoran
Anggaran



Proyek Tidak
Efektif



Inefisiensi &
Pemborosan



Beban Utang
Meningkat



Nilai Publik
Rendah

NEGARA
BOROS



“
Bukan sekadar
besar-kecilnya APBN,
tetapi nilai publik yang
dihasilkan.
”



Oleh:

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.rudyc.com/cv.pdf



Abstrak

Artikel ini menelaah perdebatan mengenai perluasan peran fiskal pemerintah dengan menolak dikotomi sederhana antara negara minimal dan negara besar. Negara kuat didefinisikan sebagai negara yang mampu menghimpun penerimaan secara sah dan adil, mengalokasikan sumber daya menurut prioritas publik, melaksanakan kebijakan secara kompeten, serta mempertanggungjawabkan hasilnya. Sebaliknya, negara boros bukan terutama negara yang membelanjakan banyak, melainkan negara yang mengubah sumber daya publik menjadi biaya administratif, rente, proyek berimbal hasil rendah, subsidi salah sasaran, dan kewajiban jangka panjang tanpa manfaat sosial yang sepadan. Dengan menggabungkan ekonomi Keynesian, teori barang publik, ekonomi kelembagaan, public choice, fiscal sociology, dan kerangka nilai untuk uang, artikel ini menganalisis defisit, utang, subsidi, investasi publik, perlindungan sosial, desentralisasi, badan usaha negara, serta risiko fiskal tersembunyi. Konteks Indonesia menunjukkan bahwa kehati-hatian fiskal perlu dipertahankan, namun ruang negara juga harus diperbesar melalui reformasi penerimaan dan peningkatan kualitas belanja. Kesimpulan utamanya ialah bahwa pilihan kebijakan yang relevan bukan “belanja atau hemat”, tetapi “belanja untuk apa, kepada siapa, dengan instrumen apa, berdasarkan bukti apa, dan siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya”. Negara yang kuat secara fiskal adalah negara yang selektif, produktif, adaptif, transparan, dan adil antargenerasi.

Kata Kunci: *negara kuat; kebijakan fiskal; kualitas belanja; defisit; utang publik; ruang fiskal; tata kelola; Indonesia*

Catatan Kontekstual

Artikel ini menggunakan informasi fiskal yang tersedia sampai 23 Juli 2026. Angka pelaksanaan APBN bersifat dinamis dan dapat direvisi. Data Semester I dipakai untuk membaca arah kebijakan, bukan untuk menyimpulkan hasil setahun penuh. Semua nilai kebijakan tetap perlu ditafsirkan bersama dokumen APBN, laporan pemerintah, audit, serta indikator outcome sektoral.

Dimensi	Negara kuat	Negara boros
Pendapatan	Basis adil, kepatuhan, legitimasi	Basis sempit, fasilitas tanpa evaluasi
Alokasi	Prioritas berbasis masalah dan bukti	Program bertumpuk dan politis
Pelaksanaan	Profesional, terkoordinasi, adaptif	Fragmentasi, duplikasi, serapan semu
Akuntabilitas	Outcome, data terbuka, pembelajaran	Fokus prosedur, menyembunyikan kegagalan
Waktu	Aset dan kewajiban lintas generasi	Biaya masa depan tidak dihitung

1. Pendahuluan: Mengapa Perdebatan Ini Kembali Menguat

Krisis berlapis—pandemi, ketegangan geopolitik, disrupti rantai pasok, perubahan iklim, transisi energi, dan revolusi kecerdasan buatan—mengembalikan pemerintah ke pusat kehidupan ekonomi. Ketika pasar tenaga kerja terguncang, harga pangan naik, atau bencana meluas, masyarakat tidak bertanya apakah negara harus hadir, melainkan apakah negara mampu hadir tepat waktu dan secara adil. Pada saat yang sama, kenaikan belanja, subsidi, dan pembiayaan publik memunculkan kekhawatiran mengenai pajak, utang, inflasi, korupsi, serta penyempitan ruang bagi generasi mendatang. Di sinilah pertanyaan “negara kuat atau negara boros?” memperoleh relevansi baru. Pertanyaan itu bukan slogan ideologis, tetapi persoalan desain institusi: bagaimana kapasitas fiskal dibangun, diarahkan, dibatasi, dan dievaluasi.

Perdebatan publik sering terjebak pada angka agregat. Belanja besar segera diasosiasikan dengan pemborosan, sedangkan pemotongan anggaran dianggap identik dengan efisiensi. Keduanya dapat keliru. Investasi kesehatan, pendidikan dasar, riset, infrastruktur tahan iklim, dan sistem data publik mungkin mahal hari ini tetapi menghasilkan kapasitas produktif selama puluhan tahun. Sebaliknya, anggaran yang kecil pun dapat boros jika dipenuhi perjalanan, duplikasi aplikasi, pengadaan yang tidak diperlukan, atau program simbolik tanpa penerima manfaat yang jelas. Analisis yang matang harus bergerak dari ukuran menuju komposisi, dari input menuju hasil, dan dari satu tahun anggaran menuju dampak sepanjang siklus hidup kebijakan.

Artikel ini menawarkan tesis bahwa kekuatan fiskal memiliki empat dimensi yang tidak dapat dipisahkan: kapasitas memperoleh pendapatan, kapasitas menentukan prioritas, kapasitas melaksanakan, dan kapasitas belajar serta mempertanggungjawabkan. Jika salah satu dimensi lemah, ekspansi fiskal mudah berubah menjadi pemborosan. Namun, jika semuanya kuat, belanja publik dapat memperbaiki kegagalan pasar, memperluas kesempatan, mengurangi risiko sistemik, dan menggerakkan transformasi struktural. Dengan kerangka tersebut, perdebatan tidak lagi berhenti pada “berapa besar pemerintah”, melainkan beralih kepada “seberapa bernilai dan seberapa dapat dipercaya tindakan pemerintah”.

2. Mendefinisikan Negara Kuat dan Negara Boros

Negara kuat bukan negara yang mendominasi semua keputusan ekonomi. Ia adalah negara yang memiliki kemampuan efektif untuk membuat aturan yang kredibel, menyediakan barang publik, menegakkan kontrak, melindungi kelompok rentan, serta mengoreksi eksternalitas tanpa mematikan kreativitas masyarakat dan dunia usaha. Kekuatan ini bersifat institusional, bukan semata koersif. Aparatur yang profesional, basis data yang dapat dioperasikan lintas lembaga, sistem pajak yang dipercaya, pengadaan yang kompetitif, audit yang independen, dan mekanisme pengaduan yang berfungsi merupakan bagian dari kekuatan tersebut. Kapasitas negara terlihat bukan pada banyaknya kementerian atau regulasi, tetapi pada konsistensi antara janji, anggaran, pelaksanaan, dan hasil.

Negara boros adalah negara yang gagal menjaga hubungan antara biaya dan nilai publik. Pemborosan dapat berbentuk teknis, seperti harga pengadaan terlalu tinggi; alokatif, ketika uang ditempatkan pada program dengan manfaat sosial rendah; distributif, ketika subsidi lebih banyak dinikmati kelompok mampu; dinamis, ketika keputusan hari ini menciptakan biaya pemeliharaan atau utang kontinjensi di masa depan; serta institusional, ketika fragmentasi kewenangan membuat banyak lembaga membiayai kegiatan serupa. Definisi ini penting karena pemborosan tidak selalu tampak sebagai pelanggaran

hukum. Program dapat sepenuhnya legal, terserap seratus persen, dan memperoleh opini audit baik, tetapi tetap tidak relevan atau tidak efektif.

Perbedaan mendasar antara negara kuat dan negara boros terletak pada kemampuan memilih. Negara kuat berani mengatakan ya kepada prioritas strategis dan tidak kepada proyek yang populer tetapi tidak layak. Ia dapat menghentikan program yang gagal tanpa menganggap penghentian sebagai kehilangan muka. Negara boros justru menumpuk komitmen, menghindari evaluasi, dan menjadikan penyerapan sebagai indikator keberhasilan. Karena sumber daya selalu terbatas, kapasitas untuk menghentikan, mengalihkan, atau mendesain ulang belanja sama pentingnya dengan kapasitas untuk memulai program baru.

3. Landasan Teoretis Peran Fiskal Pemerintah

Dalam tradisi Musgrave, fungsi fiskal mencakup alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi menjawab barang atau layanan apa yang tidak cukup disediakan pasar, seperti pertahanan, pengendalian penyakit menular, jalan umum, dan pengetahuan dasar. Fungsi distribusi mengoreksi ketimpangan kesempatan dan hasil melalui pajak, transfer, serta layanan publik. Fungsi stabilisasi meredam siklus bisnis, pengangguran, inflasi, dan guncangan besar. Ketiga fungsi ini saling berinteraksi. Program gizi anak, misalnya, sekaligus menyediakan layanan dengan eksternalitas, memperbaiki distribusi modal manusia, dan menjaga permintaan rumah tangga ketika ekonomi melemah.

Keynes menunjukkan bahwa ketika permintaan agregat runtuh dan sektor swasta menahan investasi, pemerintah dapat mencegah ekonomi terperosok melalui belanja atau pengurangan pajak yang terarah. Namun, multiplier fiskal tidak konstan. Dampaknya dipengaruhi kondisi siklus, keterbukaan ekonomi, kredibilitas kebijakan, kapasitas produksi, struktur impor, serta respons moneter. Belanja yang cepat pada sektor dengan pasokan kaku dapat menaikkan harga tanpa banyak menambah output. Karena itu, kebijakan kontrasiklus harus bersifat tepat waktu, sementara, dan terarah, sekaligus disertai strategi keluar agar respons darurat tidak berubah menjadi beban permanen.

Teori public choice mengingatkan bahwa pemerintah bukan aktor tunggal yang selalu mengetahui kepentingan umum. Politisi menghadapi siklus pemilu, birokrasi memiliki insentif memperbesar mandat, kelompok kepentingan mencari rente, dan pemilih mungkin lebih mudah melihat manfaat sekarang daripada biaya masa depan. Kritik ini tidak meniadakan peran fiskal; ia justru menuntut aturan, transparansi, kompetisi, partisipasi, dan pengawasan. Peran negara yang lebih besar tanpa institusi penyeimbang meningkatkan risiko pemborosan, sedangkan pembatasan negara tanpa memperbaiki kekuatan pasar dapat menyerahkan kebijakan kepada monopoli atau oligarki.

4. Kapasitas Fiskal: Penerimaan sebagai Fondasi

Tidak ada negara kuat tanpa kapasitas pendapatan. Pemerintah yang menjanjikan banyak layanan tetapi bergantung pada penerimaan sempit akan menghadapi tiga pilihan sulit: mengurangi mutu, menambah utang, atau mengubah kebijakan secara mendadak. Kapasitas pajak bukan hanya soal tarif; ia mencakup basis yang luas, administrasi yang mampu, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan persepsi keadilan. Ketika wajib pajak melihat kelompok kuat memperoleh pengecualian atau pengampunan berulang, kontrak fiskal melemah. Sebaliknya, pelayanan pajak yang sederhana dan penggunaan anggaran yang terlihat bermanfaat dapat meningkatkan legitimasi.

Indonesia menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar dengan rasio penerimaan dan belanja pemerintah yang relatif rendah dibanding banyak negara sebanding. OECD menekankan perlunya peningkatan penerimaan pajak jangka menengah, sementara tetap menjaga pertumbuhan dan pemerataan. Agenda yang masuk akal meliputi perluasan basis, pengurangan pengecualian yang tidak efektif, perbaikan pajak properti, penguatan pajak penghasilan orang pribadi berpendapatan tinggi, integrasi data, dan administrasi digital yang menghormati hak wajib pajak. Reformasi ini lebih berkelanjutan daripada terus-menerus menaikkan tarif pada basis yang sempit.

Keadilan pajak harus dianalisis secara menyeluruh. Pajak konsumsi relatif mudah dipungut tetapi dapat membebani rumah tangga miskin jika tidak diimbangi transfer dan pengecualian yang tepat. Pajak kekayaan dan properti lebih progresif, tetapi memerlukan valuasi, data kepemilikan, dan kapasitas lokal. Pajak sumber daya alam dapat menangkap rente, namun volatil dan rentan terhadap siklus komoditas. Negara kuat membangun portofolio penerimaan yang beragam, memperlakukan insentif pajak sebagai belanja yang harus dievaluasi, serta melaporkan tax expenditure agar publik mengetahui biaya kesempatan dari setiap fasilitas.

5. Defisit Fiskal: Alat, Bukan Identitas

Defisit bukan bukti otomatis keberanian ataupun pemborosan. Defisit adalah selisih arus yang harus ditafsirkan berdasarkan penyebab, kondisi ekonomi, cara pembiayaan, dan penggunaan dana. Defisit untuk menahan resesi atau membangun aset produktif berbeda dari defisit untuk membiayai konsumsi rutin yang terus tumbuh tanpa pendapatan permanen. Begitu pula surplus tidak selalu bijaksana; surplus yang dicapai dengan menunda pemeliharaan, menekan layanan dasar, atau menunggak pembayaran dapat memindahkan biaya ke masa depan.

Aturan defisit memberi jangkar kredibilitas dan membantu mengendalikan bias politik terhadap belanja. Namun, aturan yang terlalu kaku dapat bersifat prosiklus: pemerintah justru memotong belanja ketika ekonomi melemah. Desain yang lebih matang memadukan batas yang jelas dengan klausul pelarian untuk krisis, definisi keadaan darurat yang ketat, jalur kembali ke aturan, serta pengawasan independen. Kualitas pelaporan juga menentukan. Pemindahan kewajiban ke badan usaha, skema kerja sama, atau entitas khusus tidak menghapus risiko; ia hanya membuatnya kurang terlihat.

Data APBN Semester I 2026 perlu dibaca dalam kerangka tersebut. Kementerian Keuangan melaporkan defisit sekitar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB pada semester pertama, sedangkan outlook setahun diproyeksikan sekitar 2,85 persen PDB. Angka ini masih berada di bawah batas hukum tiga persen, tetapi batas legal hanyalah titik awal analisis. Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana belanja membentuk kapasitas produktif, apakah pendapatan bersifat berulang, seberapa besar biaya bunga, dan risiko apa yang belum tercermin dalam defisit kas. Dengan demikian, disiplin fiskal harus bersifat substantif, bukan kosmetik.

6. Utang Publik dan Keadilan Antargenerasi

Utang memungkinkan manfaat proyek jangka panjang dibagi lintas generasi. Jika jalan, sistem air, sekolah, atau infrastruktur digital digunakan selama puluhan tahun, pembiayaan melalui utang dapat lebih adil daripada membebankan seluruh biaya kepada pembayar pajak hari ini. Utang juga menyediakan ruang ketika penerimaan jatuh akibat krisis. Masalah muncul ketika kewajiban bertambah

lebih cepat daripada kemampuan ekonomi dan fiskal, ketika jatuh tempo terkonsentrasi, atau ketika dana digunakan untuk belanja berulang tanpa reformasi pendapatan.

Keberlanjutan utang tidak cukup dinilai dari satu rasio. Pemerintah perlu memantau selisih suku bunga dan pertumbuhan, komposisi mata uang, profil jatuh tempo, basis investor, kebutuhan pembiayaan bruto, sensitivitas terhadap depresiasi, serta kewajiban kontinjensi. Negara dengan rasio utang moderat pun dapat rentan jika penerimaan rendah dan biaya pinjaman tinggi. Sebaliknya, rasio yang lebih besar mungkin terkelola jika institusi kuat, pasar domestik dalam, dan pendapatan stabil. Karena itu, ruang fiskal adalah konsep multidimensi dan bersifat bergantung keadaan.

Keadilan antargenerasi meminta dua neraca sekaligus: neraca kewajiban dan neraca aset. Generasi mendatang mewarisi utang, tetapi juga dapat mewarisi manusia yang lebih sehat, pengetahuan, infrastruktur, ekosistem, serta institusi yang lebih baik. Pembiayaan utang layak ketika nilai sosial aset dan kapasitas yang diciptakan melebihi biaya sepanjang siklus hidup. Transparansi harus memasukkan biaya operasi dan pemeliharaan, karena proyek monumental yang tidak terawat adalah cara halus memindahkan pemborosan kepada masa depan.

7. Kualitas Belanja dan Konsep Value for Money

Kualitas belanja dapat ditelaah melalui ekonomi, efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan ketahanan. Ekonomi menanyakan apakah input dibeli dengan harga wajar. Efisiensi mengukur hubungan input dan output. Efektivitas menilai apakah output mengubah hasil yang dituju. Pemerataan memeriksa siapa yang menerima manfaat dan menanggung biaya. Ketahanan menilai apakah hasil bertahan ketika terjadi guncangan. Kerangka ini mencegah kekeliruan menyamakan serapan dengan prestasi. Anggaran yang terserap cepat belum tentu menyelesaikan masalah, sementara program yang sedikit terlambat mungkin menghasilkan mutu lebih baik jika pengadaan dilakukan hati-hati.

Penganggaran berbasis kinerja sering gagal karena indikator terlalu banyak, mudah dimanipulasi, atau hanya menghitung kegiatan. Jumlah rapat, peserta pelatihan, aplikasi, dan kilometer jalan tidak otomatis menunjukkan perubahan kesejahteraan. Indikator perlu membentuk rantai hasil: input, kegiatan, output, outcome, dan dampak. Setiap tingkat harus memiliki asumsi yang eksplisit. Jika hasil tidak tercapai, evaluasi harus membedakan kegagalan teori program, desain, implementasi, atau lingkungan eksternal.

World Bank Public Expenditure Review untuk Indonesia menekankan perlunya membelanjakan lebih baik agar sumber daya terbatas menghasilkan tujuan pembangunan. Implikasinya adalah penguatan appraisal sebelum proyek, pemilihan berbasis manfaat sosial, pengadaan kompetitif, pemantauan real-time, evaluasi independen, dan spending review berkala. Program yang tidak efektif harus dihentikan atau didesain ulang, bukan dipertahankan karena sudah menjadi pos rutin. Re-alokasi adalah inti manajemen fiskal, bukan tanda ketidakstabilan.

8. Subsidi, Harga, dan Politik Distribusi

Subsidi dapat melindungi daya beli, menstabilkan harga strategis, dan mendukung transisi teknologi. Namun subsidi harga yang bersifat umum sering lebih banyak menguntungkan pengguna berdaya beli tinggi karena mereka mengonsumsi lebih banyak energi atau komoditas bersubsidi. Harga yang ditekan juga mengurangi insentif efisiensi, mendorong penyelundupan, dan membuat anggaran sensitif

terhadap harga dunia serta nilai tukar. Biaya kesempatan menjadi besar ketika subsidi menggeser belanja kesehatan, pendidikan, air bersih, atau perlindungan sosial.

Reformasi subsidi tidak boleh dilakukan sebagai latihan akuntansi semata. Pengurangan subsidi mengubah pendapatan riil, biaya transportasi, struktur harga, dan kepercayaan publik. Reformasi yang baik dimulai dengan data penerima, komunikasi yang jujur, kompensasi tunai yang tersedia sebelum harga berubah, dukungan transportasi publik, dan penahanan yang dapat diprediksi. Pemerintah juga perlu melindungi kelompok yang tidak miskin secara statistik tetapi rentan terhadap guncangan. Jika kompensasi terlambat atau data salah, reformasi yang secara ekonomi benar dapat gagal secara sosial dan politik.

Subsidi produksi harus memiliki tujuan dan tanggal berakhir. Dukungan untuk kendaraan listrik, energi terbarukan, pangan, atau industri strategis dapat dibenarkan jika mengatasi eksternalitas, pembelajaran, atau koordinasi. Namun penerima perlu memenuhi tonggak kinerja, berbagi risiko, dan tunduk pada evaluasi tambahan: apakah investasi akan terjadi tanpa subsidi? Negara kuat mampu menarik dukungan ketika tujuan tidak tercapai. Negara boros membiarkan insentif sementara berubah menjadi hak permanen kelompok terorganisasi.

9. Investasi Publik dan Transformasi Struktural

Investasi publik dapat menaikkan produktivitas sektor swasta melalui konektivitas, listrik, air, pendidikan, riset, dan sistem hukum. Dampaknya terbesar ketika proyek melengkapi investasi swasta dan menjawab hambatan nyata, bukan ketika sekadar mengejar kemegahan fisik. Jalan tanpa pusat produksi, pelabuhan tanpa jaringan logistik, atau kawasan industri tanpa tenaga terampil menghasilkan aset dengan utilisasi rendah. Karena itu, perencanaan ruang, kebijakan industri, pendidikan, dan infrastruktur harus diselaraskan.

Siklus investasi yang sehat mencakup identifikasi masalah, penilaian alternatif, appraisal ekonomi dan lingkungan, seleksi, penganggaran multiyear, pengadaan, pengawasan konstruksi, operasi, pemeliharaan, serta evaluasi pascaprojek. Kecenderungan politik berfokus pada peresmian, padahal sebagian besar nilai atau pemborosan muncul setelah konstruksi. Anggaran pemeliharaan yang cukup sering memberikan pengembalian lebih tinggi daripada proyek baru. Pengabaian pemeliharaan adalah bentuk utang tersembunyi karena aset rusak lebih cepat dan akhirnya membutuhkan rehabilitasi mahal.

Kemitraan pemerintah dan badan usaha bukan uang gratis. Skema tersebut dapat membawa modal, teknologi, dan disiplin pengelolaan, tetapi juga menciptakan komitmen pembayaran jangka panjang, jaminan, dan risiko renegotiasi. Proyek harus dipilih karena efisiensi pembagian risiko, bukan untuk memindahkan utang keluar neraca. Kontrak, asumsi permintaan, dukungan pemerintah, dan nilai kini kewajiban perlu dilaporkan. Transparansi fiskal harus mengikuti substansi ekonomi, bukan bentuk hukum.

10. Perlindungan Sosial sebagai Infrastruktur Ketahanan

Perlindungan sosial sering dipandang sebagai konsumsi, padahal desain yang baik merupakan investasi dalam modal manusia dan ketahanan. Bantuan tunai mencegah keluarga menjual aset produktif, menghentikan sekolah anak, atau mengurangi konsumsi gizi ketika terjadi krisis. Asuransi kesehatan mengurangi risiko kemiskinan akibat biaya medis. Jaminan kehilangan pekerjaan membantu pencarian

kerja yang lebih sesuai. Dengan demikian, perlindungan sosial dapat mendukung produktivitas, mobilitas, dan stabilitas makroekonomi.

Masalah utamanya adalah ketepatan sasaran, kecukupan, cakupan, dan kemampuan merespons guncangan. Basis data sosial harus diperbarui, interoperabel, dapat dikoreksi, dan dilindungi. Penargetan tidak boleh diperlakukan sebagai klasifikasi sempurna; pendapatan rumah tangga berfluktuasi dan banyak pekerja berada di sektor informal. Kombinasi registrasi sosial, mekanisme pengaduan, data administratif, dan pendekatan geografis dapat mengurangi kesalahan eksklusi. Universalitas pada layanan dasar dapat dipadukan dengan transfer lebih terarah.

Perlindungan sosial adaptif menghubungkan data risiko bencana, sistem pembayaran, pembiayaan kontinjensi, dan protokol perluasan otomatis. Ketika banjir, kekeringan, atau lonjakan harga terjadi, bantuan tidak harus dirancang dari nol. Negara kuat berinvestasi dalam “pipa” institusional sebelum krisis. Pengeluaran kesiapsiagaan mungkin tampak tidak produktif pada tahun normal, tetapi nilainya terlihat ketika respons cepat mencegah kerugian yang jauh lebih besar.

11. Pendidikan, Kesehatan, dan Modal Manusia

Belanja pendidikan dan kesehatan memiliki legitimasi kuat karena menghasilkan manfaat privat dan eksternalitas sosial. Akan tetapi, tambahan anggaran tidak otomatis memperbaiki pembelajaran atau kesehatan. Hubungan antara uang dan hasil melewati guru, tenaga medis, distribusi fasilitas, insentif, manajemen, perilaku, dan konteks keluarga. Ketika tenaga profesional terkonsentrasi di kota, pengadaan tidak sesuai kebutuhan, atau absensi tinggi, input meningkat tanpa outcome sebanding.

Kualitas belanja pendidikan perlu berpindah dari kepatuhan input menuju kemampuan dasar, karakter, kreativitas, dan relevansi keterampilan. Teknologi dapat membantu, tetapi pembelian perangkat tanpa pedagogi, dukungan guru, konektivitas, dan pemeliharaan menciptakan gudang digital. Di bidang kesehatan, fokus harus bergeser menuju layanan primer, pencegahan, surveilans, gizi, dan integrasi rujukan, seraya menjaga perlindungan finansial. Pembayaran penyedia perlu memberi insentif mutu, bukan hanya volume tindakan.

Evaluasi sektor manusia harus memperhitungkan jeda panjang dan ketimpangan wilayah. Hasil pendidikan hari ini memengaruhi produktivitas beberapa dekade kemudian; intervensi gizi awal kehidupan memiliki pengembalian yang sulit terlihat dalam laporan tahunan. Karena itu, disiplin fiskal tidak boleh menjadi rabun dekat. Portofolio indikator harus menggabungkan hasil cepat, indikator antara, dan tujuan jangka panjang, dengan perhatian khusus pada anak, perempuan, penyandang disabilitas, daerah terpencil, dan kelompok yang selama ini tertinggal.

12. Birokrasi, Belanja Pegawai, dan Kapasitas Pelaksanaan

Negara tidak dapat melaksanakan kebijakan tanpa aparatur yang kompeten dan cukup dihargai. Karena itu, belanja pegawai bukan otomatis pemborosan. Guru, dokter, insinyur, auditor, perencana, penyuluh, dan petugas lapangan merupakan teknologi institusional negara. Persoalan muncul ketika struktur pegawai tidak sesuai fungsi, promosi tidak berbasis merit, organisasi bertumpuk, dan tambahan remunerasi tidak diikuti produktivitas atau akuntabilitas.

Reformasi birokrasi perlu menghubungkan desain organisasi, kompetensi, proses bisnis, dan arsitektur digital. Digitalisasi formulir yang buruk hanya memindahkan birokrasi dari kertas ke layar. Aplikasi yang

dibangun terpisah menciptakan biaya lisensi, keamanan, integrasi, dan pelatihan berulang. Pendekatan platform bersama, standar data, identitas digital, dan layanan berbasis peristiwa kehidupan dapat mengurangi duplikasi. Namun teknologi harus disertai tata kelola privasi, keamanan siber, dan akses non-digital bagi warga yang membutuhkan.

Produktivitas aparatur sebaiknya dinilai pada tingkat tim dan layanan, bukan hanya individu. Banyak hasil publik bergantung pada koordinasi lintas unit, sehingga target individual yang sempit dapat memecah kerja sama. Negara kuat membangun budaya profesional, memberi ruang eksperimen yang aman, dan melindungi pengambil keputusan yang beritikad baik, sambil menindak konflik kepentingan dan korupsi. Ketakutan berlebihan terhadap audit dapat menghasilkan kelumpuhan; pengawasan yang lemah menghasilkan penyalahgunaan. Keseimbangan memerlukan aturan yang jelas dan audit berbasis risiko.

13. Desentralisasi dan Ketimpangan Kapasitas Daerah

Desentralisasi mendekatkan keputusan kepada warga dan memungkinkan kebijakan menyesuaikan kondisi lokal. Namun, ia juga memperlihatkan ketimpangan basis pajak, kemampuan perencanaan, dan kualitas administrasi. Transfer pusat dapat memperbaiki pemerataan vertikal dan horizontal, tetapi desainnya memengaruhi insentif. Formula yang hanya menutup kesenjangan belanja tanpa mendorong kinerja dapat mempertahankan ketergantungan, sedangkan kompetisi kinerja yang mengabaikan titik awal dapat menghukum daerah tertinggal.

Penguatan fiskal daerah memerlukan kombinasi pendapatan asli yang wajar, transfer berbasis kebutuhan, standar layanan minimum, bantuan teknis, dan transparansi. Pajak properti serta retribusi layanan dapat memperkuat akuntabilitas lokal jika administrasinya modern dan tarifnya adil. Namun pemerintah pusat tidak boleh sekadar mendelegasikan kewajiban tanpa sumber daya. Unfunded mandate membuat pelayanan memburuk dan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab.

Koordinasi lintas wilayah menjadi penting untuk transportasi metropolitan, daerah aliran sungai, pengelolaan sampah, kualitas udara, dan adaptasi iklim. Batas administratif tidak selalu mengikuti wilayah fungsional. Skema pembiayaan bersama, badan layanan lintas daerah, serta data spasial dapat mengurangi fragmentasi. Negara kuat bukan hanya pusat yang kuat; ia adalah jaringan pemerintahan yang mampu bertindak konsisten sambil tetap memberi ruang inovasi lokal.

14. BUMN, Dana Publik, dan Risiko Fiskal di Luar APBN

Badan usaha milik negara dapat menjalankan layanan publik, mengatasi kekosongan pasar, atau menjadi katalis investasi. Namun mandat komersial dan kebijakan harus dipisahkan secara transparan. Jika perusahaan diminta menjual di bawah biaya, membangun proyek tidak layak komersial, atau menyerap tenaga kerja demi tujuan sosial, kompensasi dan indikatornya perlu dinyatakan. Tanpa pemisahan, kerugian dapat disalahartikan sebagai inefisiensi atau, sebaliknya, inefisiensi disembunyikan di balik penugasan.

Risiko fiskal muncul melalui penyertaan modal, jaminan utang, kewajiban pensiun, pembelian minimum, dan harapan bailout. Walaupun tidak langsung tercatat sebagai belanja, pasar dan masyarakat sering menganggap pemerintah sebagai penanggung terakhir. Karena itu, laporan risiko fiskal perlu mencakup stress test, eksposur per entitas, skenario makro, dan strategi mitigasi. Dewan

yang profesional, audit berkualitas, serta pembatasan transaksi pihak berelasi menjadi pertahanan utama.

Dana investasi publik atau sovereign wealth fund dapat menghimpun modal dan mengelola aset secara profesional, tetapi keberhasilannya bergantung pada mandat, independensi operasional, tata kelola konflik kepentingan, transparansi portofolio, dan disiplin imbal hasil yang sesuai tujuan. Dana semacam itu tidak boleh menjadi jalur untuk menghindari proses anggaran atau memindahkan risiko. Hubungan dengan APBN, dividen, jaminan, dan kerugian harus dapat ditelusuri publik.

15. Pengadaan, Korupsi, dan Ekonomi Politik Pemborosan

Pengadaan adalah titik pertemuan kebijakan, uang, dan pasar. Risiko pemborosan muncul dari spesifikasi yang diarahkan, persaingan semu, pemecahan paket, perubahan kontrak, kualitas rendah, dan harga yang sulit dibandingkan. Sistem elektronik meningkatkan jejak audit, tetapi tidak otomatis menghapus kolusi. Data pengadaan perlu dibuka dalam format yang dapat dianalisis, termasuk pemilik manfaat perusahaan, harga satuan, variasi kontrak, dan kinerja penyedia.

Korupsi bukan hanya kebocoran nominal; ia mengubah komposisi belanja. Proyek dengan peluang rente cenderung lebih disukai daripada pemeliharaan, pelayanan sosial, atau investasi kelembagaan yang manfaatnya luas tetapi kontraknya kecil. Akibatnya, korupsi menurunkan produktivitas fiskal dan kepercayaan, lalu kepatuhan pajak melemah. Terbentuk lingkaran buruk: penerimaan rendah membatasi layanan, layanan buruk mengurangi legitimasi, dan legitimasi rendah menghambat penerimaan.

Pencegahan memerlukan desain sistem, bukan sekadar seruan moral. Standardisasi, e-katalog yang kompetitif, open contracting, analitik anomali, rotasi pada posisi rawan, perlindungan pelapor, dan penegakan yang konsisten harus bekerja bersama. Partisipasi masyarakat dan media memperluas kemampuan audit, tetapi data harus cukup rinci dan tepat waktu. Transparansi tanpa keterbacaan hanya menghasilkan tumpukan dokumen.

16. Kebijakan Industri, Transisi Hijau, dan Negara Wirausaha

Perubahan iklim dan kompetisi teknologi mendorong kebangkitan kebijakan industri. Pemerintah di banyak negara memberi subsidi, kredit, pengadaan, dan investasi untuk semikonduktor, energi bersih, kendaraan listrik, atau teknologi digital. Intervensi dapat dibenarkan ketika terdapat eksternalitas pengetahuan, kegagalan koordinasi, dan kebutuhan membangun pasar. Namun risiko salah pilih, penangkapan kebijakan, dan perang subsidi sangat nyata.

Kebijakan industri yang disiplin menetapkan tujuan terukur, tambahanitas, masa berlaku, pembagian risiko, persaingan, dan kewajiban belajar. Dukungan tidak boleh sekadar diberikan kepada perusahaan terbesar atau paling dekat dengan kekuasaan. Instrumen perlu menuntut investasi riset, pengembangan pemasok domestik, pelatihan, transfer teknologi, atau penurunan emisi. Kegagalan eksperimental dapat diterima bila transparan dan menghasilkan pembelajaran; kegagalan yang terus dibiayai karena koneksi politik adalah pemborosan.

Transisi hijau menuntut penilaian fiskal lintas waktu. Investasi awal mungkin besar, tetapi mengurangi biaya kesehatan, impor energi, kerusakan bencana, dan risiko aset terlantar. Pada saat yang sama, pekerja dan wilayah yang bergantung pada energi fosil memerlukan transisi yang adil. Pendapatan

karbon atau pengurangan subsidi dapat digunakan untuk kompensasi, pelatihan, transportasi publik, dan investasi daerah. Dengan demikian, kebijakan iklim menjadi agenda pembangunan, bukan sekadar beban kepatuhan.

17. Stabilitas Makroekonomi dan Koordinasi Kebijakan

Fiskal berinteraksi dengan kebijakan moneter, nilai tukar, dan stabilitas keuangan. Ekspansi fiskal ketika ekonomi berada dekat kapasitas dapat menambah tekanan inflasi dan memaksa suku bunga lebih tinggi. Sebaliknya, pengetatan fiskal serentak dengan pengetatan moneter dapat memperdalam perlambatan. Koordinasi bukan berarti menghapus independensi bank sentral, tetapi menyelaraskan diagnosis, urutan kebijakan, dan komunikasi.

Komposisi respons terhadap inflasi menentukan hasil distribusi. Kenaikan suku bunga bekerja luas dan memiliki jeda, sementara tindakan fiskal dapat menargetkan pasokan pangan, biaya logistik, atau rumah tangga rentan. Namun subsidi harga yang luas dapat mempertahankan permintaan dan memperburuk beban anggaran. Pendekatan terbaik menggabungkan stabilisasi makro dengan perbaikan sisi penawaran dan transfer terarah, seraya menghindari kebijakan yang saling meniadakan.

Cadangan fiskal, dana kontinjensi, strategi utang, dan automatic stabilizers meningkatkan kemampuan merespons tanpa kepanikan. Negara yang membangun ruang pada masa baik dapat bertindak saat buruk. Namun konsolidasi harus memperhatikan siklus dan mutu. Pemotongan investasi bernilai tinggi karena paling mudah ditunda dapat memperbaiki angka jangka pendek tetapi melemahkan pertumbuhan dan penerimaan masa depan. Konsolidasi cerdas meninjau subsidi, pengecualian pajak, duplikasi, serta program berkinerja rendah.

18. Demokrasi Fiskal, Kepercayaan, dan Akuntabilitas

Anggaran adalah dokumen moral dan politik karena menentukan siapa membayar, siapa menerima, risiko apa yang ditanggung bersama, dan masa depan apa yang diprioritaskan. Karena itu, keputusan fiskal tidak cukup menjadi urusan teknokrat. Parlemen, pemerintah daerah, lembaga audit, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan warga memerlukan informasi yang dapat digunakan. Konsultasi harus berlangsung sebelum keputusan terkunci, bukan setelah anggaran selesai.

Kepercayaan fiskal tumbuh ketika aturan konsisten, data dapat diverifikasi, dan pemerintah mengakui ketidakpastian. Proyeksi makro sebaiknya disertai skenario, asumsi, serta rekam jejak kesalahan ramalan. Lembaga fiskal independen dapat memperkaya perdebatan melalui evaluasi nonpartisan terhadap asumsi, biaya janji politik, dan keberlanjutan. Independensi tersebut melengkapi, bukan menggantikan, legitimasi demokratis.

Akuntabilitas harus bergerak dari pelanggaran prosedur menuju hasil dan pembelajaran. Pemerintah perlu melaporkan bukan hanya berapa dana dibelanjakan, tetapi apa yang berubah, siapa yang tidak terjangkau, dan mengapa. Evaluasi negatif tidak seharusnya otomatis dipakai sebagai senjata politik; jika setiap pengakuan kegagalan dihukum, organisasi akan menyembunyikan masalah. Budaya belajar membutuhkan perlindungan bagi evaluasi jujur sekaligus konsekuensi bagi manipulasi, kelalaian berat, dan konflik kepentingan.

19. Kerangka Diagnostik: Dari Besaran menuju Nilai Publik

Setiap usulan fiskal dapat diuji melalui sepuluh pertanyaan. Masalah publik apa yang hendak dipecahkan? Mengapa pasar, keluarga, komunitas, atau pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikannya sendiri? Siapa penerima manfaat dan penanggung biaya? Instrumen apa yang paling tepat: regulasi, pajak, transfer, pengadaan, investasi, jaminan, atau kemitraan? Berapa biaya sepanjang siklus hidup? Risiko apa yang dialihkan kepada negara? Bagaimana tambahanitas dibuktikan? Data apa yang digunakan? Kapan program dievaluasi atau dihentikan? Siapa yang bertanggung jawab?

Kerangka tersebut dapat dipadatkan menjadi matriks relevansi, efektivitas, efisiensi, pemerataan, keberlanjutan, dan keterlaksanaan. Relevansi memastikan masalah penting dan peran pemerintah jelas. Efektivitas menilai hubungan kausal. Efisiensi membandingkan alternatif. Pemerataan melihat distribusi. Keberlanjutan mencakup pembiayaan, lingkungan, dan kapasitas. Keterlaksanaan menguji sumber daya manusia, data, waktu, dan koordinasi. Program yang gagal pada satu dimensi perlu didesain ulang sebelum diperbesar.

Portofolio anggaran juga harus dinilai, sebab program yang baik secara individual dapat menghasilkan komposisi keseluruhan yang buruk. Terlalu banyak proyek baru dapat menguras pemeliharaan; terlalu banyak bantuan sektoral dapat mengunci struktur lama; terlalu banyak program kecil dapat membebani administrasi. Spending review lintas sektor membantu menemukan duplikasi dan trade-off. Keputusan anggaran terbaik sering berupa pengalihan, integrasi, atau penyederhanaan, bukan tambahan.

20. Agenda Reformasi Fiskal Indonesia

Agenda pertama adalah memperkuat kontrak pendapatan. Reformasi pajak perlu memadukan basis yang lebih luas, administrasi berbasis risiko, kepastian, perlindungan data, penyelesaian sengketa yang kredibel, serta pengurangan fasilitas yang tidak terbukti. Setiap insentif harus memiliki tujuan, penerima, biaya, indikator, dan sunset clause. Pendapatan sumber daya perlu dikelola dengan aturan yang meredam volatilitas dan mengubah rente tidak terbarukan menjadi aset manusia, fisik, dan alam.

Agenda kedua adalah membangun arsitektur kualitas belanja. Pemerintah memerlukan appraisal independen untuk proyek besar, spending review tahunan, penganggaran multiyear, biaya siklus hidup, dan mekanisme penghentian program. Indikator harus berfokus pada outcome dan ketimpangan. Data pengadaan, transfer, bantuan sosial, proyek, dan hasil layanan perlu dihubungkan dengan perlindungan privasi. Pengawasan berbasis risiko dapat memusatkan perhatian pada nilai dan area rentan.

Agenda ketiga adalah memperkuat neraca publik dan manajemen risiko. Laporan fiskal perlu mengonsolidasikan utang, aset, jaminan, kemitraan, BUMN, pensiun, risiko bencana, dan dampak iklim. Stress test sebaiknya dipublikasikan dalam bahasa yang dapat dipahami. Cadangan dan strategi pembiayaan kontinjensi harus disiapkan sebelum krisis. Dengan neraca yang lebih utuh, pemerintah tidak terdorong mengejar defisit rendah melalui pemindahan kewajiban.

Agenda keempat adalah memperdalam demokrasi anggaran. Dokumen ringkas warga, data terbuka, konsultasi pra-anggaran, evaluasi independen, dan tindak lanjut rekomendasi audit perlu dilembagakan. Parlemen membutuhkan kapasitas analitis yang memadai untuk menilai asumsi dan konsekuensi jangka panjang. Pemerintah pusat dan daerah harus memperjelas pembagian tanggung jawab. Reformasi teknis hanya bertahan jika didukung koalisi publik yang memahami mengapa prioritas, pajak, dan evaluasi diperlukan.

21. Skenario Kebijakan: Ekspansif, Hemat, atau Selektif-Produktif

Skenario ekspansif menambah berbagai program secara bersamaan dengan harapan mempercepat pertumbuhan dan memenuhi tuntutan sosial. Keuntungannya adalah daya dorong yang cepat dan visibilitas politik. Risikonya adalah kapasitas pelaksanaan terlampaui, impor meningkat, inflasi muncul, dan proyek bermutu rendah ikut lolos. Skenario ini hanya layak ketika ekonomi memiliki kelonggaran, pembiayaan stabil, proyek siap, serta institusi mampu menyaring dan mengeksekusi.

Skenario hemat menahan belanja dan memprioritaskan defisit rendah. Ia dapat memulihkan kepercayaan ketika risiko utang meningkat atau inflasi tinggi. Namun penghematan menyeluruh berisiko memotong pemeliharaan, layanan dasar, dan investasi produktif. Dampaknya juga dapat regresif jika rumah tangga miskin lebih bergantung pada layanan publik. Karena itu, konsolidasi harus berorientasi komposisi dan pendapatan, bukan pemotongan rata.

Skenario selektif-produktif paling konsisten dengan negara kuat. Pemerintah melindungi layanan dasar, investasi berpengembalian sosial tinggi, pemeliharaan, dan perlindungan adaptif; pada saat yang sama menghapus duplikasi, subsidi regresif, insentif tanpa bukti, serta proyek yang belum siap. Pendapatan diperkuat secara bertahap dan adil. Ruang darurat dipertahankan. Pendekatan ini lebih menuntut secara politik karena membutuhkan prioritas dan penolakan, tetapi menghasilkan keseimbangan lebih baik antara kapasitas dan disiplin.

22. Kesimpulan

Perdebatan mengenai negara kuat atau negara boros tidak dapat diselesaikan dengan satu angka defisit, rasio utang, atau persentase belanja. Negara dapat kecil tetapi lemah dan boros; negara dapat besar tetapi efektif; dan negara dapat disiplin pada kas namun mengabaikan aset, lingkungan, serta kewajiban tersembunyi. Ukuran yang lebih bermakna adalah kemampuan mengubah sumber daya publik menjadi kebebasan substantif, produktivitas, perlindungan, dan kepercayaan.

Bagi Indonesia, tantangannya bersifat ganda. Kapasitas penerimaan perlu diperbesar agar kebutuhan pembangunan tidak terus berkompetisi dalam ruang sempit, sementara kualitas dan transparansi belanja harus ditingkatkan agar tambahan penerimaan memperoleh legitimasi. Kehati-hatian terhadap defisit dan utang tetap penting, tetapi harus berjalan bersama investasi manusia, infrastruktur, ketahanan iklim, dan perlindungan sosial. Disiplin yang mengorbankan fondasi masa depan sama tidak bijaksananya dengan ekspansi tanpa kendali.

Pada akhirnya, negara kuat adalah negara yang mampu memilih, melaksanakan, mengoreksi, dan menjelaskan. Ia tidak mengukur keberhasilan dari besarnya anggaran atau serapan, tetapi dari perubahan yang dapat dibuktikan. Ia mengakui trade-off, membuka data, menanggung evaluasi, dan menjaga keadilan antargenerasi. Negara boros bukan takdir dari pemerintahan aktif; ia adalah hasil institusi yang tidak mampu membedakan prioritas dari kepentingan, investasi dari konsumsi politik, serta keberanian fiskal dari kecerobohan.

23. Pendalaman Sektoral: Delapan Belas Uji Negara Kuat

Prinsip fiskal menjadi bermakna ketika diuji pada keputusan konkret. Delapan belas ilustrasi berikut bukan rancangan teknis final, melainkan cara membaca trade-off. Masing-masing memperlihatkan

masalah yang dapat membenarkan tindakan pemerintah, bentuk intervensi yang berpotensi menciptakan nilai publik, sumber pemborosan, dan indikator yang seharusnya mengarahkan evaluasi.

23.1 Ketahanan pangan dan stabilisasi harga

Kasus ketahanan pangan dan stabilisasi harga berangkat dari volatilitas musim, konsentrasi distribusi, data stok yang lemah, dan hambatan logistik antardaerah. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup irigasi, penyuluhan, cadangan yang dikelola transparan, konektivitas dingin, informasi harga, serta transfer sementara kepada rumah tangga rentan. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui operasi pasar permanen, penahanan harga tanpa perbaikan pasokan, dan penugasan yang kerugiannya tidak dikompensasi secara terbuka. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembandingan atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesiediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.2 Program makan bergizi

Kasus program makan bergizi berangkat dari kekurangan gizi, ketimpangan akses makanan sehat, serta dampak jangka panjang terhadap belajar dan produktivitas. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta

membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup standar gizi, pengadaan lokal yang kompetitif, keamanan pangan, pembayaran berbasis verifikasi, dan pemantauan pertumbuhan anak. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui perluasan nasional lebih cepat daripada dapur, pemasok, ahli gizi, pengawasan mutu, dan sistem pengaduan. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembanding. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.3 Subsidi energi

Kasus subsidi energi berangkat dari guncangan harga global dan kebutuhan menjaga daya beli serta daya saing. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup transfer terarah, tarif bertingkat, transportasi publik, efisiensi energi, dan kompensasi yang dibayar sebelum penyesuaian harga. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada

kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui subsidi komoditas terbuka yang terutama dinikmati pengguna besar dan menghilangkan sinyal penghematan. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembandingan atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesiediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.4 Transisi kendaraan listrik

Kasus transisi kendaraan listrik berangkat dari eksternalitas emisi, pembelajaran teknologi, ketergantungan impor energi, dan peluang rantai nilai. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup insentif sementara berbasis emisi sepanjang siklus hidup, kandungan pembelajaran, daur ulang baterai, serta infrastruktur pengisian. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingkan institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui subsidi pembelian tanpa batas pendapatan, tanpa tambahanitas, dan tanpa memperhitungkan sumber listrik maupun kemacetan. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas

pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesiapan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.5 Infrastruktur jalan dan pelabuhan

Kasus infrastruktur jalan dan pelabuhan berangkat dari biaya logistik tinggi serta keterisolasian pusat produksi. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup appraisal jaringan, konektivitas last-mile, pemeliharaan, keselamatan, dan integrasi dengan tata ruang. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui proyek monumental dengan proyeksi permintaan optimistis, pembebasan lahan belum siap, dan anggaran pemeliharaan minimal. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembanding. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan,

dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.6 Ibu kota dan pusat pertumbuhan baru

Kasus ibu kota dan pusat pertumbuhan baru berangkat dari konsentrasi ekonomi, ketimpangan wilayah, beban lingkungan kota lama, dan kebutuhan tata pemerintahan modern. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup tahapan berbasis permintaan, pembiayaan transparan, perlindungan ekologi, layanan dasar, dan evaluasi biaya kesempatan. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingkan institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui komitmen serentak berskala besar yang menggeser prioritas, mengandalkan penjualan aset, atau menyembunyikan jaminan. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembandingan atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.7 Digitalisasi pemerintahan

Kasus digitalisasi pemerintahan berangkat dari layanan terfragmentasi, biaya transaksi warga, data ganda, dan pengawasan lambat. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan

distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup arsitektur bersama, interoperabilitas, identitas digital, keamanan siber, privasi, dan desain inklusif. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui ribuan aplikasi berdiri sendiri, kontrak vendor terkunci, fitur tanpa pengguna, serta duplikasi pusat dan daerah. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembandingan atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesiediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.8 Kecerdasan buatan untuk layanan publik

Kasus kecerdasan buatan untuk layanan publik berangkat dari keterbatasan kapasitas analisis, deteksi risiko, personalisasi layanan, dan kebutuhan respons cepat. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup proyek uji terbatas, data berkualitas, human oversight, audit algoritma, pengadaan terbuka, dan evaluasi manfaat. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya

dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui pembelian sistem mahal karena tren, otomatisasi keputusan berisiko tinggi, dan ketergantungan pada model yang tidak dapat diperiksa. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembandingan atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Ketersediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.9 Pendidikan tinggi dan riset

Kasus pendidikan tinggi dan riset berangkat dari rendahnya produktivitas inovasi, kesenjangan mutu, serta kebutuhan talenta untuk transformasi ekonomi. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup pendanaan kompetitif dan dasar yang seimbang, peer review, kolaborasi industri, open science, serta dukungan karier peneliti. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingkan institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui pembangunan gedung tanpa agenda riset, hibah tersebar terlalu tipis, dan indikator yang mendorong publikasi semu. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko

fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesiapan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.10 Jaminan kesehatan

Kasus jaminan kesehatan berangkat dari risiko finansial rumah tangga, kebutuhan layanan esensial, dan kegagalan pasar asuransi. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup penguatan primer, pembelian strategis, penilaian teknologi kesehatan, pencegahan fraud, dan kontribusi yang adil. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui pembayaran berbasis volume tanpa kendali mutu, manfaat tidak disesuaikan kemampuan pembiayaan, dan tunggakan berulang. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembanding. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan.

Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.11 Perumahan rakyat

Kasus perumahan rakyat berangkat dari defisit hunian layak, harga tanah, aglomerasi, dan ketidakmampuan rumah tangga berpendapatan rendah mengakses kredit. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup sewa sosial, dukungan sisi permintaan yang terarah, reformasi lahan, transportasi, dan standar lokasi. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui subsidi kredit yang dikapitalisasi menjadi harga, rumah jauh dari pekerjaan, dan proyek tanpa layanan dasar. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembanding. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.12 Air minum dan sanitasi

Kasus air minum dan sanitasi berangkat dari eksternalitas kesehatan, monopoli alamiah, dan kesenjangan akses wilayah. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan

setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup investasi jaringan, pengurangan kebocoran, tarif berjenjang, subsidi sambungan, serta tata kelola operator. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui pembangunan kapasitas produksi tanpa sambungan rumah, tarif tidak menutup operasi, dan pemeliharaan ditunda. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembandingan atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Ketersediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.13 Adaptasi perubahan iklim

Kasus adaptasi perubahan iklim berangkat dari banjir, kekeringan, kebakaran, kenaikan muka laut, dan kerugian yang makin tidak dapat diasuransikan. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup pemetaan risiko, standar bangunan, restorasi ekosistem, pembiayaan kontinjensi, dan perlindungan sosial adaptif. Rangkaian ini menekankan bahwa

uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui rekonstruksi berulang tanpa relokasi atau pencegahan, proyek abu-abu mahal, dan biaya iklim tidak masuk appraisal. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembanding. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesiediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.14 Pertahanan dan keamanan siber

Kasus pertahanan dan keamanan siber berangkat dari barang publik nasional, ancaman lintas batas, serta ketergantungan infrastruktur kritis pada sistem digital. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup perencanaan kapabilitas multiyear, pengadaan kompetitif yang sesuai kerahasiaan, interoperabilitas, dan audit parlemen. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui pengadaan platform terpisah, biaya siklus hidup diabaikan, offset tidak terukur, dan kerahasiaan digunakan menutup akuntabilitas. Pola ini biasanya disertai

optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembandingan atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.15 Pengembangan UMKM

Kasus pengembangan umkm berangkat dari kendala pembiayaan, informasi, teknologi, standar mutu, dan akses pasar. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup jaminan parsial, layanan pengembangan usaha, e-invoicing sederhana, pengadaan inklusif, dan klaster pemasok. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui kredit murah tanpa seleksi dan pendampingan, program pelatihan seragam, serta bantuan alat yang tidak digunakan. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang

dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.16 Hilirisasi sumber daya alam

Kasus hilirisasi sumber daya alam berangkat dari ekspor bernilai tambah rendah, kegagalan koordinasi industri, dan peluang pembelajaran domestik. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup infrastruktur bersama, standar lingkungan, kompetisi, riset, keterampilan, dan insentif menurun seiring kedewasaan. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui larangan dan fasilitas tanpa evaluasi biaya, ketergantungan pada satu pasar, serta pengabaian dampak sosial-ekologis. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembanding. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.17 Transfer fiskal ke daerah

Kasus transfer fiskal ke daerah berangkat dari ketimpangan basis pendapatan, perbedaan biaya layanan, dan kebutuhan standar minimum nasional. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup formula kebutuhan yang transparan, insentif kinerja yang adil, data biaya, dan bantuan kapasitas. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui formula kompleks yang mudah dinegosiasikan, banyak dana berlabel sempit, dan pelaporan yang tidak terkait outcome. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembandingan. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembandingan atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Kesediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

23.18 Pembiayaan bencana

Kasus pembiayaan bencana berangkat dari frekuensi guncangan, kebutuhan likuiditas cepat, dan ketidakpastian kerugian. Keberadaan masalah tersebut belum dengan sendirinya membenarkan setiap bentuk belanja. Pemerintah terlebih dahulu perlu menyatakan kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang hendak dikoreksi, memetakan kelompok terdampak, serta membandingkan instrumen regulasi, pajak, transfer, pengadaan, dan investasi. Baseline harus dicatat sebelum program dimulai agar perubahan tidak keliru diklaim sebagai hasil kebijakan. Analisis juga perlu memasukkan variasi wilayah, perilaku penerima, respons pelaku usaha, dampak harga, dan kapasitas pelaksana. Tanpa diagnosis tersebut, program mudah menjadi jawaban anggaran atas masalah yang belum dirumuskan.

Pilihan yang mencerminkan negara kuat mencakup lapisan pembiayaan dari cadangan, realokasi, kredit kontinjensi, dan asuransi untuk risiko jarang tetapi berat. Rangkaian ini menekankan bahwa uang harus didampingi institusi, data, kompetensi, dan mekanisme koreksi. Pelaksanaan sebaiknya dimulai pada skala yang dapat dipelajari, dengan tonggak perluasan yang bergantung pada kesiapan dan hasil. Kontrak perlu membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Pemerintah harus melaporkan biaya unit, waktu layanan, distribusi manfaat, mutu, keluhan, serta biaya operasi jangka panjang. Ketika konteks berubah, desain dapat disesuaikan tanpa mengubah tujuan publik yang telah disepakati.

Jalur menuju negara boros muncul melalui mengandalkan APBN perubahan setelah kejadian, bantuan lambat, pengadaan darurat tanpa jejak, dan rekonstruksi tanpa standar lebih baik. Pola ini biasanya disertai optimisme berlebihan, tekanan untuk menghabiskan alokasi, indikator kegiatan, dan minimnya pembanding. Risiko fiskal dapat tersembunyi dalam jaminan, biaya pemeliharaan, kerugian entitas pelaksana, atau kebutuhan penyelamatan kemudian. Pemborosan juga terjadi ketika manfaat terkonsentrasi pada kelompok terorganisasi sedangkan biaya tersebar kepada pembayar pajak. Transparansi harus mencakup pemilik manfaat penyedia, perubahan kontrak, dasar penetapan harga, dan hubungan antara dukungan pemerintah dengan investasi tambahan.

Keputusan kelanjutan program seharusnya menggunakan tiga horizon. Dalam jangka pendek dinilai ketepatan penerima, kecepatan, mutu output, dan dampak harga. Dalam jangka menengah diperiksa perubahan perilaku, produktivitas, pemerataan, serta kemampuan lembaga. Dalam jangka panjang dihitung aset, kewajiban, emisi atau kerusakan lingkungan, dan ketahanan terhadap guncangan. Evaluasi harus memiliki kelompok pembanding atau strategi identifikasi yang layak jika memungkinkan, dilengkapi bukti kualitatif. Hasilnya menghasilkan pilihan nyata: diperluas, dipertahankan, diperbaiki, digabungkan, atau dihentikan. Ketersediaan mengambil salah satu pilihan berdasarkan bukti adalah ukuran kapasitas negara.

Glossarium

Automatic stabilizers: Mekanisme penerimaan atau belanja yang berubah otomatis mengikuti siklus ekonomi, seperti pajak progresif dan tunjangan pengangguran.

Belanja pajak (tax expenditure): Penerimaan yang dilepaskan melalui pengecualian, pengurangan, kredit, atau tarif khusus untuk tujuan kebijakan tertentu.

Defisit fiskal: Selisih ketika belanja pemerintah dalam suatu periode melebihi pendapatannya.

Efektivitas: Derajat tercapainya outcome atau tujuan kebijakan.

Efisiensi: Hubungan antara input yang digunakan dan output atau outcome yang dihasilkan.

Eksternalitas: Dampak kegiatan ekonomi kepada pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar.

Fiscal space: Kapasitas pemerintah menambah belanja atau mengurangi pajak tanpa membahayakan keberlanjutan dan akses pembiayaan.

Kewajiban kontinjensi: Kewajiban yang menjadi beban pemerintah jika peristiwa tertentu terjadi, misalnya jaminan kredit atau bailout.

Multiplier fiskal: Perubahan output ekonomi yang timbul dari satu unit perubahan belanja atau pajak.

Nilai untuk uang (value for money): Kerangka penilaian ekonomi, efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan ketahanan penggunaan dana publik.

Outcome: Perubahan kondisi masyarakat yang diharapkan setelah output layanan tersedia.

Output: Barang atau layanan langsung yang dihasilkan suatu program.

Primary balance: Saldo anggaran sebelum pembayaran bunga utang.

Public choice: Pendekatan yang menganalisis insentif politik, birokrasi, pemilih, dan kelompok kepentingan dalam keputusan publik.

Ruang fiskal: Padanan fiscal space; kemampuan mengambil tindakan fiskal tambahan secara aman.

Spending review: Peninjauan sistematis atas belanja yang ada untuk menemukan penghematan, duplikasi, dan peluang realokasi.

Sunset clause: Ketentuan bahwa kebijakan atau insentif berakhir pada tanggal tertentu kecuali diperpanjang setelah evaluasi.

Utang publik: Kewajiban pinjaman pemerintah yang harus dilunasi sesuai kontrak.

Daftar Pustaka

- Alesina, A., & Passalacqua, A. (2016). The political economy of government debt. In J. B. Taylor & H. Uhlig (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 2, pp. 2599–2651). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hesmac.2016.03.014>
- Besley, T., & Persson, T. (2009). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics. *American Economic Review*, 99(4), 1218–1244. <https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1218>
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229. <https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197>
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of Monetary Economics*, 37(2), 313–344. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(96\)90039-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(96)90039-2)
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). Tax capacity and growth: Is there a tipping point? IMF Working Papers, 2016(234). <https://doi.org/10.5089/9781475558173.001>
- Heller, P. S. (2005). Understanding fiscal space. IMF Policy Discussion Paper, 05/4. <https://doi.org/10.5089/9781451975635.003>
- Ilzetzki, E., Mendoza, E. G., & Végh, C. A. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? *Journal of Monetary Economics*, 60(2), 239–254. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2012.10.011>
- International Monetary Fund. (2025). Indonesia: 2024 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia. IMF Staff Country Reports. <https://doi.org/10.5089/9798400295711.002>
- Lewis, C. (2019). Raising more public revenue in Indonesia in a growth- and equity-friendly way. OECD Economics Department Working Papers, No. 1534. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a487771f-en>
- Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>

- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- OECD. (2019). *Social protection system review of Indonesia*. OECD Development Pathways. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/788e9d71-en>
- OECD. (2024). *OECD economic surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/de87555a-en>
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>
- Pritchett, L., Woolcock, M., & Andrews, M. (2013). Looking like a state: Techniques of persistent failure in state capability for implementation. *Journal of Development Studies*, 49(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/00220388.2012.709614>
- Reinhart, C. M., Reinhart, V. R., & Rogoff, K. S. (2012). Public debt overhangs: Advanced-economy episodes since 1800. *Journal of Economic Perspectives*, 26(3), 69–86. <https://doi.org/10.1257/jep.26.3.69>
- Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104. <https://doi.org/10.1257/aer.98.2.100>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W. W. Norton.
- World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review 2020: Spending for better results*. World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/33954>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, July 7). APBN 2026 tetap sehat dukung pertumbuhan ekonomi. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/APBN-2026-Tetap-Sehat-Dukung-Pertumbuhan-Ekonomi>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, July). APBN Semester I 2026: Fondasi pertumbuhan yang semakin kokoh. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-semester-i-2026-fondasi-pertumbuhan-yang-semakin-kokoh>